

Pandangan Masyarakat di Desa Powalutan tentang Demokrasi Politik Kekinian

Hana Indriani Burmias¹, Romi Mesra²

^{1,2}Program Studi Pendidikan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Manado
 Email: 120606031@unima.ac.id, 2romimesra@unima.ac.id

ARTICLE INFO

Article history:

Received March 14, 2025
 Accepted March 25, 2025
 Published May 30, 2025

Kata Kunci:

Demokrasi Lokal,
 Partisipasi Politik,
 Masyarakat Desa,
 Gotong Royong,
 Akuntabilitas Pemerintah



Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi pandangan masyarakat di Desa Powalutan tentang demokrasi politik kekinian, mencakup pemahaman mereka tentang konsep demokrasi, pentingnya demokrasi dalam kehidupan, dan praktik demokrasi sehari-hari. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi dan wawancara mendalam terhadap warga masyarakat desa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat memahami demokrasi sebagai sistem partisipasi rakyat melalui pemilihan wakil rakyat secara bebas, akuntabilitas pemerintah kepada rakyat, dan kebebasan mengemukakan pendapat. Masyarakat menilai demokrasi penting untuk mengontrol pemerintah dan menjamin pemerintahan yang bersih. Praktik demokrasi diwujudkan melalui partisipasi dalam kegiatan kemasyarakatan, menjaga ketertiban dan keamanan, serta gotong royong yang mengintegrasikan nilai tradisional dengan prinsip demokrasi modern. Penelitian ini menyimpulkan bahwa masyarakat Desa Powalutan telah menginternalisasi nilai-nilai demokrasi, meskipun masih terdapat kesenjangan antara harapan normatif dengan praktik politik riil yang memerlukan penguatan institusional dan pendidikan politik berkelanjutan.

Abstract

This study aims to explore the views of the people of Powalutan Village on contemporary political democracy, including their understanding of the concept of democracy, its importance in life, and their daily democratic practices. The research method used a qualitative approach with data collection techniques through observation and in-depth interviews with village residents. The results show that the community understands democracy as a system of popular participation through the free election of representatives, government accountability to the people, and freedom of expression. The community considers democracy important for controlling the government and ensuring clean governance. Democratic practices are realized through participation in community activities, maintaining order and security, and mutual cooperation that integrates traditional values with modern democratic principles. This study concludes that the people of Powalutan Village have internalized democratic values, although there is still a gap between normative expectations and real political practices that require institutional strengthening and continuous political education.

Keywords: Local Democracy, Political Participation, Village Communities, Gotong Royong, Government Accountability

A. Pendahuluan

Demokrasi sebagai sistem pemerintahan telah menjadi pilihan utama bagi sebagian besar negara di dunia, termasuk Indonesia yang telah menjalani transformasi politik pasca-reformasi 1998. Dalam konteks Indonesia, demokrasi tidak hanya dipahami sebagai mekanisme pemilihan pemimpin melalui pemilu, tetapi juga mencakup partisipasi masyarakat dalam

pengambilan keputusan, kebebasan berpendapat, dan akuntabilitas pemerintahan (Aspinall & Mietzner, 2019). Namun, implementasi demokrasi di tingkat lokal, khususnya di desa-desa, menunjukkan dinamika yang kompleks dan beragam, tergantung pada konteks sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat setempat. Desa sebagai entitas pemerintahan terkecil menjadi arena penting untuk mengamati bagaimana nilai-nilai demokrasi dipahami, dipraktikkan, dan dinegosiasikan oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari mereka.

Perkembangan demokrasi di Indonesia mengalami berbagai tantangan, terutama dalam mewujudkan partisipasi politik yang substantif di tingkat akar rumput. Studi yang dilakukan oleh Tornquist (2013) menunjukkan bahwa demokrasi di Indonesia masih menghadapi persoalan oligarki politik, money politics, dan rendahnya kualitas representasi politik yang berdampak pada menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap institusi demokratis. Sementara itu, Pratikno (2005) menggarisbawahi bahwa desentralisasi dan otonomi daerah yang dimulai sejak tahun 1999 telah membuka ruang bagi partisipasi politik lokal, namun seringkali terkooptasi oleh elite lokal yang melanggar praktik-praktik patronase dan klientelisme. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan kritis mengenai sejauh mana masyarakat desa memahami dan mengalami demokrasi dalam realitas politik kekinian yang ditandai dengan polarisasi, politik identitas, dan dominasi media sosial dalam pembentukan opini publik.

Desa Powalutan, sebagai salah satu desa di Indonesia, menjadi lokus yang menarik untuk mengkaji pandangan masyarakat terhadap demokrasi politik kekinian. Dalam konteks masyarakat pedesaan, pemahaman tentang demokrasi seringkali tidak terpisahkan dari nilai-nilai lokal, struktur sosial tradisional, dan pengalaman historis masyarakat dalam berinteraksi dengan kekuasaan politik (Antlöv, 2003). Penelitian tentang pandangan masyarakat desa terhadap demokrasi menjadi penting untuk memahami bagaimana warga negara di level paling bawah memaknai hak-hak politik mereka, menilai kinerja institusi demokratis, dan merespons berbagai fenomena politik kontemporer seperti populisme, hoaks, dan pragmatisme politik. Pemahaman yang mendalam tentang perspektif masyarakat desa ini dapat memberikan kontribusi bagi upaya penguatan demokrasi yang lebih inklusif dan partisipatif di Indonesia.

Beberapa penelitian terdahulu telah mengkaji tentang demokrasi di tingkat lokal dan partisipasi politik masyarakat desa di Indonesia. Penelitian Syarif Hidayat (2007) tentang patronase dalam demokrasi lokal menunjukkan bahwa hubungan patron-klien masih mendominasi interaksi politik di tingkat desa, di mana masyarakat cenderung memilih pemimpin berdasarkan kedekatan personal dan harapan akan manfaat material daripada platform kebijakan atau visi politik. Temuan ini mengindikasikan bahwa pemahaman masyarakat tentang demokrasi masih terbatas pada aspek prosedural pemilihan, tanpa disertai kesadaran kritis terhadap substansi demokrasi seperti akuntabilitas dan transparansi. Sementara itu, Nurhasim (2003) dalam studinya tentang perilaku pemilih di pedesaan menemukan bahwa faktor-faktor primordial seperti ikatan kekerabatan, agama, dan etnisitas masih sangat berpengaruh dalam menentukan pilihan politik masyarakat desa, yang menunjukkan bahwa demokrasi di tingkat lokal masih diwarnai oleh politik identitas yang kuat.

Di sisi lain, penelitian Buehler (2009) tentang desentralisasi dan politik lokal di Indonesia pasca-reformasi mengungkapkan bahwa otonomi desa telah membuka peluang bagi munculnya kepemimpinan lokal yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat, namun juga menciptakan arena baru bagi kontestasi elite lokal yang tidak selalu menguntungkan partisipasi masyarakat luas. Penelitian-penelitian tersebut memberikan gambaran tentang kompleksitas demokrasi di tingkat lokal, namun sebagian besar fokus pada aspek struktural dan perilaku elite politik, sementara pemahaman mendalam tentang bagaimana masyarakat biasa di desa memandang dan memaknai demokrasi politik kekinian, termasuk fenomena-fenomena baru seperti politik media sosial, politik populis, dan polarisasi politik, masih belum banyak dieksplorasi secara komprehensif.

Meskipun sejumlah studi telah mengkaji demokrasi lokal dan partisipasi politik di pedesaan, terdapat kesenjangan penelitian yang signifikan dalam memahami pandangan masyarakat desa terhadap demokrasi politik kontemporer. Sebagian besar penelitian terdahulu cenderung menggunakan pendekatan top-down yang melihat masyarakat desa sebagai objek dari proses demokratisasi, bukan sebagai subjek yang aktif dengan perspektif dan interpretasi mereka sendiri terhadap demokrasi. Selain itu, penelitian-penelitian sebelumnya lebih banyak fokus pada perilaku elektoral dan mekanisme formal demokrasi, sementara dimensi kultural, persepsi nilai, dan pengalaman hidup masyarakat dalam mengalami demokrasi kurang mendapat perhatian. Dalam konteks politik kekinian yang ditandai dengan transformasi cepat akibat digitalisasi, perubahan lanskap media, dan munculnya fenomena politik baru, diperlukan pemahaman yang lebih kontekstual tentang bagaimana masyarakat desa menginterpretasikan dan merespons perkembangan demokrasi ini.

Lebih jauh, studi-studi tentang demokrasi di tingkat desa umumnya menggunakan pendekatan kuantitatif atau survey yang mengukur tingkat partisipasi atau preferensi politik, namun kurang menggali secara mendalam narasi, pengalaman, dan refleksi kritis masyarakat tentang makna demokrasi bagi kehidupan mereka. Kesenjangan ini menjadi penting untuk dijawab, terutama mengingat bahwa pemahaman tentang demokrasi tidak dapat dilepaskan dari konteks lokal, sejarah politik masyarakat, dan dinamika sosial-budaya yang spesifik. Penelitian yang mampu mengungkap pandangan masyarakat Desa Powalutan secara holistik, dengan mempertimbangkan konteks lokal dan perubahan politik nasional, akan memberikan kontribusi penting bagi literatur tentang demokrasi lokal di Indonesia dan dapat menjadi basis bagi perumusan kebijakan yang lebih sesuai dengan realitas dan kebutuhan masyarakat akar rumput.

Kebaruan penelitian ini terletak pada fokusnya yang spesifik terhadap pandangan masyarakat Desa Powalutan tentang demokrasi politik kekinian, dengan menggunakan pendekatan kualitatif yang mendalam untuk mengeksplorasi persepsi, interpretasi, dan pengalaman masyarakat dalam konteks perubahan politik kontemporer. Berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya yang cenderung generalis atau fokus pada mekanisme formal demokrasi, penelitian ini berupaya memahami bagaimana masyarakat desa dengan latar belakang sosial-budaya tertentu memaknai fenomena-fenomena politik kekinian seperti polarisasi politik, politik identitas, peran media sosial dalam politik, dan perubahan pola partisipasi politik. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menangkap nuansa, kompleksitas, dan dinamika pemahaman masyarakat yang tidak dapat dijangkau melalui pendekatan survey atau studi struktural semata.

Selain itu, penelitian ini juga memberikan kontribusi teoretis dengan menghubungkan konsep demokrasi formal dengan praktik demokrasi keseharian di tingkat desa, serta menganalisis bagaimana nilai-nilai lokal, tradisi, dan struktur sosial masyarakat Desa Powalutan berinteraksi dengan norma-norma demokrasi modern. Dengan mengkaji pandangan masyarakat terhadap demokrasi politik kekinian secara kontekstual, penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan pemahaman yang lebih kaya tentang bagaimana demokrasi dialami, dinegosiasikan, dan ditransformasikan dalam konteks lokal yang spesifik. Temuan dari penelitian ini tidak hanya akan memperkaya literatur akademik tentang demokrasi lokal dan studi pedesaan, tetapi juga dapat memberikan masukan praktis bagi para pemangku kepentingan dalam merancang program-program pendidikan politik dan penguatan demokrasi yang lebih berbasis dan sesuai dengan realitas masyarakat akar rumput.

Realitas politik kekinian di Indonesia menunjukkan bahwa demokrasi sedang mengalami berbagai tantangan serius yang juga dirasakan hingga ke tingkat desa. Fenomena polarisasi politik yang menguat pasca-pemilihan presiden, penyebaran informasi yang tidak akurat

melalui media sosial, serta menguatnya politik identitas dan populisme telah mengubah lanskap politik Indonesia secara signifikan. Di tingkat desa, masyarakat tidak lagi terisolasi dari dinamika politik nasional karena penetrasi teknologi informasi dan komunikasi telah memungkinkan mereka mengakses berbagai informasi politik secara langsung. Kondisi ini menciptakan situasi di mana masyarakat desa harus menavigasi antara nilai-nilai lokal tradisional dengan tuntutan partisipasi politik modern, antara loyalitas komunal dengan pilihan politik individual, serta antara kepercayaan pada pemimpin lokal dengan skeptisisme terhadap elite politik nasional.

Di Desa Powalutan sendiri, sebagaimana banyak desa lain di Indonesia, realitas demokrasi politik tidak dapat dilepaskan dari konteks sosial-ekonomi masyarakat, struktur kepemimpinan tradisional, dan pengalaman historis mereka dalam berinteraksi dengan kekuasaan negara. Masyarakat desa mengalami demokrasi bukan hanya melalui ritual pemilihan umum lima tahunan, tetapi juga dalam praktik-praktik keseharian seperti musyawarah desa, pengelolaan sumber daya bersama, dan resolusi konflik lokal. Namun, praktik-praktik demokrasi lokal ini sering kali berhadapan dengan logika demokrasi formal yang dibawa oleh regulasi negara, program pembangunan, dan intervensi politik dari luar desa. Memahami bagaimana masyarakat Desa Powalutan memandang dan memaknai demokrasi politik kekinian dalam konteks realitas yang kompleks ini menjadi penting untuk mengidentifikasi peluang dan tantangan bagi penguatan demokrasi yang lebih substantif dan bermakna bagi kehidupan masyarakat akar rumput.

B. Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk mengeksplorasi pandangan masyarakat di Desa Powalutan tentang demokrasi politik kekinian. Pendekatan kualitatif dipilih karena memungkinkan peneliti untuk memahami fenomena sosial secara mendalam melalui perspektif partisipan, mengungkap makna subjektif, dan menangkap kompleksitas pengalaman manusia dalam konteks alamiahnya (Creswell, 2014). Metode kualitatif sangat sesuai untuk penelitian yang bertujuan memahami persepsi, interpretasi, dan pengalaman hidup masyarakat terkait demokrasi, karena memungkinkan peneliti untuk menggali narasi, nilai-nilai, dan pandangan dunia informan secara holistik tanpa terikat pada kategorisasi yang kaku. Dalam penelitian ini, pendekatan kualitatif memberikan ruang bagi suara masyarakat Desa Powalutan untuk terdengar secara autentik, sehingga dapat menghasilkan pemahaman yang kaya dan kontekstual tentang bagaimana mereka memaknai demokrasi dalam kehidupan mereka. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui observasi dan wawancara mendalam. Observasi merupakan teknik pengumpulan data dengan mengamati secara langsung aktivitas, perilaku, dan interaksi sosial masyarakat dalam konteks alamiahnya (Kawulich, 2005). Melalui observasi, peneliti dapat memperoleh data tentang praktik-praktik demokrasi dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Desa Powalutan, termasuk bagaimana mereka berpartisipasi dalam pengambilan keputusan kolektif, berinteraksi dengan pemerintah desa, dan mengekspresikan aspirasi politik mereka. Observasi dilakukan di berbagai setting sosial di desa, termasuk pertemuan-pertemuan warga, kegiatan kemasyarakatan, dan interaksi informal antarwarga, untuk mendapatkan gambaran komprehensif tentang dinamika politik lokal dan praktik demokrasi keseharian. Wawancara mendalam dilakukan dengan sejumlah informan yang dipilih secara purposif, yaitu warga masyarakat Desa Powalutan yang memiliki pemahaman dan pengalaman terkait dengan kehidupan politik di desa. Teknik wawancara mendalam memungkinkan peneliti untuk menggali pandangan, pemahaman, dan refleksi informan secara detail melalui dialog yang interaktif dan fleksibel (Kvale & Brinkmann, 2009). Data yang terkumpul melalui observasi dan wawancara kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis tematik, yaitu proses mengidentifikasi, menganalisis, dan melaporkan pola atau tema dalam

data kualitatif. Analisis dimulai dengan membaca dan memahami keseluruhan data secara menyeluruh, kemudian mengkode data untuk mengidentifikasi unit-unit makna yang relevan, mengelompokkan kode-kode ke dalam tema-tema yang lebih luas, dan akhirnya menginterpretasikan tema-tema tersebut dalam konteks pertanyaan penelitian dan kerangka teoretis. Proses analisis dilakukan secara iteratif, dengan terus-menerus membandingkan data, kode, dan tema untuk memastikan konsistensi dan kedalaman interpretasi. Validitas dan reliabilitas penelitian dijaga melalui triangulasi data dari berbagai sumber dan metode, serta member checking untuk memastikan bahwa interpretasi peneliti sesuai dengan pandangan informan. Seluruh proses penelitian dilakukan dengan memperhatikan prinsip-prinsip etika penelitian, termasuk informed consent, kerahasiaan identitas informan, dan penghormatan terhadap martabat dan otonomi partisipan.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Hasil Penelitian

a. Pemahaman Masyarakat tentang Konsep Demokrasi

Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat Desa Powalutan memiliki pemahaman yang beragam tentang konsep demokrasi, meskipun terdapat benang merah yang menghubungkan berbagai perspektif tersebut. Dari hasil wawancara dengan Bapak RP, terungkap bahwa demokrasi dipahami terutama sebagai partisipasi rakyat dalam pemerintahan, khususnya melalui mekanisme pemilihan wakil-wakil rakyat untuk lembaga perwakilan secara langsung dan bebas. Pemahaman ini menunjukkan bahwa aspek prosedural demokrasi, terutama pemilu sebagai instrumen utama partisipasi politik, telah tertanam dengan baik dalam kesadaran masyarakat. Hal ini mengindikasikan bahwa sosialisasi politik formal yang dilakukan oleh negara melalui berbagai program pendidikan politik dan pelaksanaan pemilu secara berkala telah berhasil membangun pemahaman dasar tentang mekanisme demokrasi elektoral di tingkat masyarakat desa.

Namun demikian, pemahaman masyarakat tentang demokrasi tidak terbatas hanya pada aspek pemilihan pemimpin semata. Hasil observasi menunjukkan bahwa masyarakat memandang demokrasi sebagai sistem pemerintahan di mana penguasa mempertanggungjawabkan kekuasaannya kepada warga masyarakat. Konsep akuntabilitas ini menunjukkan bahwa masyarakat Desa Powalutan telah memiliki kesadaran tentang aspek substantif demokrasi, yaitu bahwa legitimasi kekuasaan tidak hanya berasal dari proses pemilihan yang demokratis, tetapi juga harus disertai dengan pertanggungjawaban penguasa terhadap rakyat yang dipimpinnya. Pemahaman tentang akuntabilitas ini penting karena menunjukkan bahwa masyarakat tidak sekadar menjadi objek pasif dalam proses demokratisasi, tetapi memiliki ekspektasi aktif terhadap kinerja dan tanggung jawab pemerintah. Kesadaran ini menjadi modal sosial yang penting untuk mendorong praktik pemerintahan yang lebih responsif dan bertanggung jawab di tingkat lokal.

Ketika ditanya tentang demokrasi Pancasila, informan menyatakan bahwa demokrasi Pancasila adalah demokrasi yang berlaku di tanah air saat ini. Meskipun penjelasan ini terkesan sederhana, pemahaman ini mencerminkan kesadaran masyarakat bahwa demokrasi di Indonesia memiliki karakteristik khusus yang dibingkai oleh nilai-nilai Pancasila sebagai ideologi negara. Pemahaman ini penting karena menunjukkan bahwa masyarakat tidak semata-mata mengadopsi konsep demokrasi liberal Barat, tetapi menyadari adanya kontekstualisasi demokrasi sesuai dengan nilai-nilai dan budaya Indonesia. Namun, keterbatasan elaborasi tentang substansi demokrasi Pancasila juga mengindikasikan bahwa pemahaman masyarakat tentang dimensi

filosofis dan praktis dari demokrasi Pancasila masih perlu diperdalam, terutama terkait dengan bagaimana nilai-nilai seperti musyawarah mufakat, keadilan sosial, dan persatuan dapat diimplementasikan dalam praktik demokrasi lokal.

b. Pentingnya Demokrasi dalam Kehidupan Masyarakat

Masyarakat Desa Powalutan menilai bahwa demokrasi memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari mereka. Menurut Bapak RP,

”...pentingnya demokrasi terletak pada terjadinya kontrol dari masyarakat terhadap pemerintah dalam membuktikan kebebasan kepada masyarakat dalam mengemukakan pendapat dan menjamin terciptanya pemerintahan yang bersih”.

Gambar 1. Wawancara dengan Bapak RP



Sumber: Data Primer

Pandangan ini menunjukkan bahwa masyarakat memahami demokrasi tidak hanya sebagai ritual politik lima tahunan, tetapi sebagai sistem yang memberikan hak dan ruang bagi warga negara untuk mengawasi jalannya pemerintahan. Konsep kontrol sosial terhadap pemerintah ini penting karena mencerminkan kesadaran bahwa kekuasaan dapat disalahgunakan jika tidak ada mekanisme pengawasan yang efektif dari masyarakat. Pemahaman ini sejalan dengan prinsip checks and balances dalam sistem demokrasi, di mana kekuasaan tidak boleh terkonsentrasi dan harus dapat diawasi oleh berbagai pihak.

Aspek kebebasan mengemukakan pendapat yang disebutkan oleh informan juga menunjukkan bahwa masyarakat menghargai hak-hak sipil politik sebagai bagian penting dari demokrasi. Dalam konteks masyarakat desa yang secara tradisional mungkin memiliki struktur sosial yang hierarkis dan nilai-nilai komunal yang kuat, pengakuan terhadap kebebasan berpendapat individual merupakan perkembangan yang signifikan. Hal ini mengindikasikan bahwa nilai-nilai demokrasi modern telah mulai terinternalisasi dalam kesadaran masyarakat, meskipun dalam praktiknya mungkin masih terdapat negosiasi antara nilai kebebasan individual dengan norma-norma sosial tradisional. Kebebasan mengemukakan pendapat dipandang penting bukan hanya sebagai hak individual, tetapi juga sebagai mekanisme untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Dengan demikian, masyarakat menghubungkan kebebasan politik dengan tujuan praktis menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik.

Pandangan tentang demokrasi sebagai jaminan bagi terciptanya pemerintahan yang bersih mencerminkan harapan dan ekspektasi masyarakat terhadap sistem politik. Dalam konteks

Indonesia di mana praktik korupsi dan penyalahgunaan wewenang masih menjadi masalah serius, aspirasi untuk memiliki pemerintahan yang bersih menjadi sangat relevan. Masyarakat Desa Powalutan memandang demokrasi sebagai instrumen untuk mewujudkan good governance, di mana transparansi, akuntabilitas, dan integritas menjadi nilai-nilai yang dijunjung tinggi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Namun, kesenjangan antara harapan normatif tentang demokrasi dengan realitas praktik politik yang seringkali masih diwarnai oleh money politics, patronase, dan korupsi dapat menimbulkan dissonansi kognitif yang berpotensi menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi demokratis. Oleh karena itu, upaya untuk menjembatani kesenjangan antara idealisme demokrasi dengan praktik politik riil menjadi tantangan penting dalam penguatan demokrasi di tingkat lokal.

c. Praktik Demokrasi dalam Kehidupan Sehari-hari

Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat Desa Powalutan mempraktikkan demokrasi tidak hanya melalui partisipasi dalam pemilu, tetapi juga dalam berbagai aktivitas keseharian yang mencerminkan nilai-nilai demokratis. Menurut Ibu GT,

”...contoh demokrasi dalam masyarakat termasuk ikut berpartisipasi dalam kegiatan masyarakat, menjaga ketertiban dan keamanan, serta melakukan gotong royong dengan semua warga”.

Gambar 2. Wawancara dengan Ibu GT



Sumber: Data Primer

Pemahaman ini menunjukkan bahwa masyarakat memiliki konsepsi luas tentang demokrasi yang melampaui aspek politik formal dan mencakup dimensi sosial-kemasyarakatan. Partisipasi dalam kegiatan kemasyarakatan dipandang sebagai wujud nyata dari praktik demokrasi, di mana setiap warga memiliki hak dan tanggung jawab yang sama dalam membangun dan memelihara kehidupan bersama. Ini mencerminkan pemahaman bahwa demokrasi bukan hanya tentang hak-hak politik, tetapi juga tentang kewajiban sosial dan solidaritas komunal.

Praktik menjaga ketertiban dan keamanan yang disebutkan sebagai contoh demokrasi menunjukkan bahwa masyarakat memahami demokrasi dalam kerangka tanggung jawab bersama untuk menciptakan lingkungan yang aman dan tertib. Dalam konteks ini, demokrasi tidak dipahami semata-mata sebagai kebebasan individual yang tanpa batas, tetapi sebagai keseimbangan antara hak dan kewajiban, antara kebebasan dan tanggung jawab. Pemahaman ini penting karena mencerminkan kontekstualisasi nilai demokrasi dalam budaya lokal

Indonesia yang menghargai keharmonisan sosial dan kepentingan bersama. Partisipasi dalam menjaga ketertiban dan keamanan juga dapat dipahami sebagai bentuk kontrol sosial informal yang melengkapi mekanisme formal penegakan hukum, di mana warga masyarakat secara aktif terlibat dalam menciptakan dan memelihara tatanan sosial yang damai dan sejahtera.

Gotong royong yang disebutkan sebagai contoh demokrasi sangat menarik karena menunjukkan bagaimana nilai tradisional Indonesia diintegrasikan dengan konsep demokrasi modern. Gotong royong sebagai tradisi kerja sama dan tolong-menolong dalam masyarakat Indonesia memiliki semangat yang sejalan dengan prinsip-prinsip demokratis seperti partisipasi, kesetaraan, dan solidaritas. Dalam praktik gotong royong, semua warga, tanpa memandang status sosial atau ekonomi, diharapkan berpartisipasi sesuai dengan kemampuan masing-masing untuk mencapai tujuan bersama. Ini mencerminkan nilai demokrasi yang inklusif dan egaliter. Namun, perlu dicatat bahwa dalam konteks perubahan sosial yang cepat, praktik gotong royong juga menghadapi tantangan, seperti individualisasi, urbanisasi, dan perubahan struktur ekonomi yang dapat melemahkan solidaritas sosial tradisional. Oleh karena itu, upaya untuk melestarikan dan merevitalisasi praktik gotong royong sebagai wujud demokrasi keseharian menjadi penting dalam konteks penguatan modal sosial dan kohesi sosial di tingkat komunitas lokal.

2. Pembahasan

a. Pemahaman Masyarakat tentang Konsep Demokrasi

Pemahaman masyarakat Desa Powalutan tentang demokrasi yang menekankan pada partisipasi rakyat melalui pemilihan wakil rakyat secara langsung dan bebas sejalan dengan konsep demokrasi prosedural yang dikemukakan oleh Schumpeter (1942), yang mendefinisikan demokrasi sebagai metode politik untuk mencapai keputusan politik melalui kompetisi pemilihan suara rakyat. Pemahaman ini mencerminkan keberhasilan proses sosialisasi politik formal di Indonesia yang menekankan aspek elektoral sebagai pilar utama demokrasi. Namun, menurut Dahl (1989), demokrasi yang berkualitas tidak hanya ditentukan oleh prosedur pemilihan yang bebas dan adil, tetapi juga oleh tersedianya kesempatan yang efektif bagi warga negara untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan politik dan memiliki kontrol final atas agenda politik. Dalam konteks ini, meskipun masyarakat desa telah memahami aspek prosedural demokrasi, pemahaman tentang dimensi substansial demokrasi masih perlu diperdalam untuk mewujudkan partisipasi politik yang lebih bermakna.

Konsep akuntabilitas yang muncul dalam pemahaman masyarakat tentang demokrasi sebagai sistem di mana penguasa mempertanggungjawabkan kekuasaannya kepada rakyat menunjukkan kesadaran tentang prinsip pemerintahan yang responsif dan bertanggung jawab. Menurut O'Donnell (1998), akuntabilitas merupakan elemen fundamental dalam demokrasi yang mencakup akuntabilitas horizontal (kontrol antar lembaga negara) dan akuntabilitas vertikal (kontrol rakyat terhadap pemerintah melalui pemilu dan mekanisme lainnya). Pemahaman masyarakat tentang akuntabilitas vertikal ini penting karena menunjukkan bahwa mereka tidak hanya memandang diri sebagai pemilih pasif, tetapi sebagai warga negara yang memiliki hak untuk mengawasi dan menuntut pertanggungjawaban dari para pemimpin yang mereka pilih. Hal ini sejalan dengan argumen Przeworski et al. (1999) yang menekankan bahwa dalam demokrasi, pemerintah harus bertanggung jawab kepada rakyat dan dapat diganti melalui mekanisme konstitusional jika gagal memenuhi harapan rakyat.

Pemahaman tentang demokrasi Pancasila sebagai demokrasi yang berlaku di Indonesia mencerminkan kesadaran akan kontekstualisasi demokrasi dalam kerangka budaya dan ideologi nasional. Menurut Hatta (1960), demokrasi Pancasila berbeda dengan demokrasi liberal Barat karena menekankan pada musyawarah mufakat, keadilan sosial, dan keseimbangan antara hak

individu dengan kepentingan bersama. Pemahaman masyarakat tentang demokrasi Pancasila, meskipun masih terbatas pada pengakuan eksistensinya, menunjukkan bahwa masyarakat tidak sepenuhnya mengadopsi model demokrasi liberal, tetapi menyadari adanya ciri khas demokrasi Indonesia. Namun, sebagaimana dikritik oleh Feith (1962), konsep demokrasi Pancasila sering kali masih ambigu dalam praktiknya dan dapat diinterpretasikan secara berbeda oleh berbagai pihak. Oleh karena itu, diperlukan upaya pendidikan politik yang lebih intensif untuk membantu masyarakat memahami substansi dan implementasi nilai-nilai demokrasi Pancasila dalam kehidupan politik sehari-hari, sehingga konsep ini tidak hanya menjadi retorika politik tetapi benar-benar dipraktikkan dalam tata kelola pemerintahan dan interaksi sosial-politik di tingkat lokal.

b. Pentingnya Demokrasi dalam Kehidupan Masyarakat

Pandangan masyarakat tentang pentingnya demokrasi sebagai mekanisme kontrol sosial terhadap pemerintah mencerminkan prinsip akuntabilitas vertikal yang merupakan elemen kunci dalam teori demokrasi modern. Menurut Diamond (2008), salah satu fungsi penting demokrasi adalah memberikan mekanisme bagi warga negara untuk mengawasi dan mengendalikan kekuasaan pemerintah, sehingga mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang dan memastikan bahwa kebijakan publik sejalan dengan kepentingan rakyat. Kesadaran masyarakat tentang fungsi kontrol ini menunjukkan bahwa mereka telah melampaui pemahaman pasif tentang demokrasi dan mulai menginternalisasi peran aktif sebagai warga negara yang memiliki hak dan tanggung jawab dalam mengawasi jalannya pemerintahan. Hal ini sejalan dengan konsep citizenship yang dikemukakan oleh Marshall (1950), yang menekankan bahwa kewarganegaraan tidak hanya mencakup hak-hak sipil dan politik, tetapi juga partisipasi aktif dalam kehidupan politik dan pengawasan terhadap institusi-institusi publik.

Penekanan pada kebebasan mengemukakan pendapat sebagai aspek penting demokrasi menunjukkan bahwa masyarakat menghargai kebebasan berekspresi sebagai hak fundamental dalam sistem demokratis. Sen (1999) berpendapat bahwa kebebasan politik, termasuk kebebasan berbicara dan berpendapat, merupakan komponen intrinsik dari pembangunan manusia dan memiliki peran instrumental dalam menciptakan pemerintahan yang responsif dan akuntabel. Dalam konteks masyarakat desa yang secara tradisional mungkin memiliki norma-norma sosial yang membatasi ekspresi individual demi harmoni komunal, pengakuan terhadap pentingnya kebebasan berpendapat merupakan perkembangan signifikan yang menunjukkan proses transformasi nilai-nilai politik. Namun, menurut Geertz (1973), dalam masyarakat dengan budaya kolektif yang kuat, implementasi kebebasan individual sering kali harus dinegosiasikan dengan nilai-nilai komunal dan norma-norma sosial yang ada. Oleh karena itu, praktik kebebasan berpendapat di tingkat lokal mungkin berbeda dengan konsep liberal murni, dan perlu dipahami dalam konteks sistem nilai lokal yang spesifik.

Harapan masyarakat bahwa demokrasi dapat menjamin terciptanya pemerintahan yang bersih mencerminkan aspirasi terhadap good governance yang menjadi salah satu tujuan penting demokratisasi. Menurut World Bank (1992), good governance mencakup karakteristik seperti akuntabilitas, transparansi, rule of law, dan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan. Rothstein dan Teorell (2008) berpendapat bahwa kualitas pemerintahan, khususnya dalam hal integritas dan ketiadaan korupsi, memiliki pengaruh signifikan terhadap kepuasan dan kepercayaan masyarakat terhadap sistem demokrasi. Dalam konteks Indonesia di mana korupsi masih menjadi masalah endemik, harapan masyarakat terhadap pemerintahan yang bersih menjadi sangat penting tetapi juga rentan terhadap kekecewaan jika ekspektasi ini tidak terpenuhi. Norris (2011) menunjukkan bahwa kesenjangan antara harapan normatif tentang

bagaimana demokrasi seharusnya berfungsi dengan realitas praktik politik dapat menyebabkan democratic deficit yang pada gilirannya menurunkan legitimasi dan dukungan publik terhadap institusi-institusi demokratis. Oleh karena itu, upaya mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel bukan hanya penting untuk mencapai tujuan good governance, tetapi juga untuk mempertahankan kepercayaan dan dukungan masyarakat terhadap sistem demokrasi itu sendiri.

c. Praktik Demokrasi dalam Kehidupan Sehari-hari

Praktik demokrasi dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Desa Powalutan yang mencakup partisipasi dalam kegiatan kemasyarakatan mencerminkan konsep civic engagement yang merupakan fondasi penting bagi demokrasi yang sehat. Menurut Putnam (2000), partisipasi aktif warga dalam berbagai organisasi dan kegiatan kemasyarakatan membentuk modal sosial yang penting bagi berfungsinya institusi-institusi demokratis, karena menciptakan norma-norma timbal balik, kepercayaan sosial, dan jaringan kolaborasi yang memfasilitasi aksi kolektif. Dalam konteks masyarakat desa, partisipasi dalam kegiatan kemasyarakatan tidak hanya berfungsi sebagai wahana untuk mencapai tujuan-tujuan praktis, tetapi juga sebagai arena pembelajaran demokrasi di mana warga mempraktikkan keterampilan deliberasi, negosiasi, dan pengambilan keputusan kolektif. Tocqueville (1835) dalam studinya tentang demokrasi di Amerika telah menunjukkan bahwa asosiasi-asosiasi lokal berfungsi sebagai "sekolah demokrasi" di mana warga belajar tentang hak dan tanggung jawab demokratis melalui partisipasi langsung dalam urusan-urusan bersama.

Praktik menjaga ketertiban dan keamanan sebagai wujud demokrasi menunjukkan pemahaman tentang keseimbangan antara hak dan kewajiban dalam sistem demokratis. Locke (1690) dalam teori kontrak sosialnya berpendapat bahwa individu menyerahkan sebagian kebebasan alamiahnya kepada negara untuk mendapatkan jaminan keamanan dan ketertiban, tetapi negara harus tetap bertanggung jawab kepada rakyat dan tidak boleh melanggar hak-hak dasar warga. Dalam konteks demokrasi partisipatoris, keterlibatan warga dalam menjaga ketertiban dan keamanan dapat dipahami sebagai bentuk co-production of public services, di mana pemerintah dan masyarakat bekerja sama dalam penyediaan barang dan jasa publik (Ostrom, 1996). Praktik ini mencerminkan model demokrasi yang tidak hanya mengandalkan institusi formal negara, tetapi juga mengaktifkan partisipasi warga dalam pengelolaan urusan-urusan publik. Namun, perlu juga dicatat bahwa dalam beberapa konteks, praktik keamanan berbasis masyarakat dapat menimbulkan masalah jika tidak diimbangi dengan mekanisme akuntabilitas yang jelas dan penghormatan terhadap hak asasi manusia.

Gotong royong sebagai manifestasi demokrasi dalam kehidupan sehari-hari menunjukkan bagaimana nilai-nilai tradisional dapat diintegrasikan dengan prinsip-prinsip demokrasi modern. Bowen (1986) menjelaskan bahwa gotong royong merupakan institusi sosial tradisional Indonesia yang menekankan kerja sama, solidaritas, dan tanggung jawab bersama dalam mencapai tujuan komunal. Dalam kerangka teori demokrasi deliberatif yang dikemukakan oleh Habermas (1996), gotong royong dapat dipahami sebagai ruang publik di mana warga berkumpul, berdiskusi, dan bekerja sama untuk menyelesaikan masalah-masalah bersama melalui komunikasi dan aksi kolektif. Praktik gotong royong mencerminkan prinsip-prinsip egalitarian di mana semua warga, terlepas dari status sosial atau ekonomi, diharapkan berpartisipasi dan berkontribusi sesuai dengan kemampuannya. Namun, sebagaimana dicatat oleh Sullivan (1992), dalam konteks modernisasi dan perubahan sosial-ekonomi, institusi tradisional seperti gotong royong menghadapi tantangan berupa individualisasi, monetisasi hubungan sosial, dan melemahnya ikatan komunal. Oleh karena itu, revitalisasi praktik gotong royong dalam konteks demokrasi kontemporer memerlukan adaptasi dan rekontekstualisasi yang mempertimbangkan perubahan sosial yang terjadi, sambil tetap mempertahankan semangat solidaritas dan partisipasi kolektif yang menjadi esensi dari praktik tersebut.

D. Kesimpulan

Penelitian tentang pandangan masyarakat di Desa Powalutan terhadap demokrasi politik kekinian menunjukkan bahwa masyarakat telah memiliki pemahaman yang cukup baik tentang konsep-konsep dasar demokrasi, baik dalam dimensi prosedural maupun substansial. Pemahaman tentang demokrasi sebagai sistem partisipasi rakyat melalui pemilihan wakil rakyat secara bebas dan langsung, pentingnya akuntabilitas pemerintah kepada rakyat, serta kebebasan mengemukakan pendapat sebagai elemen fundamental demokrasi menunjukkan bahwa nilai-nilai demokrasi telah terinternalisasi dalam kesadaran politik masyarakat. Lebih dari itu, masyarakat tidak hanya memahami demokrasi sebagai ritual politik formal, tetapi juga sebagai praktik kehidupan sehari-hari yang diwujudkan melalui partisipasi dalam kegiatan kemasyarakatan, menjaga ketertiban dan keamanan, serta gotong royong. Integrasi antara nilai-nilai demokrasi modern dengan tradisi lokal seperti gotong royong menunjukkan bahwa masyarakat mampu mengkontekstualisasikan demokrasi dalam kerangka budaya dan nilai-nilai lokal mereka, sehingga demokrasi tidak sekadar menjadi konsep asing yang dipaksakan, tetapi menjadi bagian organik dari kehidupan sosial masyarakat.

Namun demikian, penelitian ini juga mengidentifikasi beberapa tantangan dalam praktik demokrasi di tingkat lokal, terutama terkait dengan kesenjangan antara harapan normatif tentang demokrasi dengan realitas politik yang masih diwarnai oleh berbagai permasalahan seperti korupsi, patronase, dan money politics. Harapan masyarakat terhadap demokrasi sebagai sistem yang dapat menjamin pemerintahan yang bersih dan akuntabel menghadapi ujian dalam konteks praktik politik yang tidak selalu sejalan dengan prinsip-prinsip good governance. Oleh karena itu, upaya penguatan demokrasi di tingkat lokal memerlukan tidak hanya pendidikan politik yang meningkatkan pemahaman konseptual masyarakat tentang demokrasi, tetapi juga reformasi institusional dan penegakan hukum yang konsisten untuk mewujudkan praktik demokrasi yang substantif dan bermakna bagi kehidupan masyarakat. Penguatan modal sosial melalui revitalisasi praktik-praktik partisipasi lokal seperti gotong royong juga penting untuk membangun fondasi sosial yang kuat bagi demokrasi yang inklusif dan berkelanjutan di tingkat desa.

E. Daftar Pustaka

- Antlöv, H. (2003). Village government and rural development in Indonesia: The new democratic framework. *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, 39(2), 193-214.
- Aspinall, E., & Mietzner, M. (2019). *Southeast Asia's troubling elections: Nondemocratic pluralism in Indonesia*. Cambridge University Press.
- Bowen, J. R. (1986). On the political construction of tradition: Gotong royong in Indonesia. *Journal of Asian Studies*, 45(3), 545-561.
- Buehler, M. (2009). The rising importance of personal networks in Indonesian local politics: An analysis of district government head elections in South Sulawesi in 2005. *Decentralisation and regional autonomy in Indonesia: Implementation and challenges*, 101-124.
- Creswell, J. W. (2014). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (4th ed.). SAGE Publications.
- Dahl, R. A. (1989). *Democracy and its critics*. Yale University Press.
- Diamond, L. (2008). *The spirit of democracy: The struggle to build free societies throughout the world*. Times Books.
- Feith, H. (1962). *The decline of constitutional democracy in Indonesia*. Cornell University

- Press.
- Geertz, C. (1973). *The interpretation of cultures*. Basic Books.
- Habermas, J. (1996). *Between facts and norms: Contributions to a discourse theory of law and democracy*. MIT Press.
- Hatta, M. (1960). *Demokrasi kita*. Pandji Masjarakat.
- Kawulich, B. B. (2005). Participant observation as a data collection method. *Forum: Qualitative Social Research*, 6(2), Article 43.
- Kvale, S., & Brinkmann, S. (2009). *InterViews: Learning the craft of qualitative research interviewing* (2nd ed.). SAGE Publications.
- Locke, J. (1690). *Two treatises of government*. Awnsham Churchill.
- Marshall, T. H. (1950). *Citizenship and social class*. Cambridge University Press.
- Norris, P. (2011). *Democratic deficit: Critical citizens revisited*. Cambridge University Press.
- Nurhasim, M. (2003). *Konflik dan integrasi politik Orde Baru*. Lapera Pustaka Utama.
- O'Donnell, G. (1998). Horizontal accountability in new democracies. *Journal of Democracy*, 9(3), 112-126.
- Ostrom, E. (1996). Crossing the great divide: Coproduction, synergy, and development. *World Development*, 24(6), 1073-1087.
- Pratikno. (2005). Desentralisasi pilihan yang tidak pernah final. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 9(2), 147-168.
- Przeworski, A., Stokes, S. C., & Manin, B. (1999). *Democracy, accountability, and representation*. Cambridge University Press.
- Putnam, R. D. (2000). *Bowling alone: The collapse and revival of American community*. Simon & Schuster.
- Rothstein, B., & Teorell, J. (2008). What is quality of government? A theory of impartial government institutions. *Governance*, 21(2), 165-190.
- Schumpeter, J. A. (1942). *Capitalism, socialism and democracy*. Harper & Brothers.
- Sen, A. (1999). *Development as freedom*. Oxford University Press.
- Sullivan, J. (1992). *Local government and community in Java: An urban case-study*. Oxford University Press.
- Syarif Hidayat. (2007). Shadow state? Business and politics in the province of Banten. In H. Schulte Nordholt & G. van Klinken (Eds.), *Renegotiating boundaries: Local politics in post-Suharto Indonesia* (pp. 203-224). KITLV Press.
- Tocqueville, A. de. (1835). *Democracy in America*. Saunders and Otley.
- Tornquist, O. (2013). *Assessing dynamics of democratisation: Transformative politics, new institutions, and the case of Indonesia*. Palgrave Macmillan.
- World Bank. (1992). *Governance and development*. World Bank.